Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman
JIPKIS
Vol. 5, No. 1, April, 2025 hal. 167-182
Journal Page is available to https://jipkis.stai-dq.org/index.php/home

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM: AUDIT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI SITUS RESMI 25 PTNBH

Supatmin[1], Tosuerdi[2]
[1]Universitas Pamulang
[2]Universitas Nahdatul Ulama Cirebon
Email: dosen01767@unpam.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) mengelola keuangan secara otonom dan sebagian besar dananya berasal dari mahasiswa dan masyarakat. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik mengumumkan laporan keuangannya secara berkala, tetapi penilaian keterbukaan yang ada (monitoring dan evaluasi Komisi Informasi) bersifat menyeluruh dan tidak menunjukkan apakah dokumen keuangan pokok benar-benar tersedia di situs resmi. Tujuan: Memeriksa apakah 25 PTNBH mengungkapkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan teraudit tahun anggaran (TA) 2025, arsip laporan, dan dokumen anggaran di situs resminya, serta seberapa cepat laporan TA 2025 dipublikasikan. Metode: Audit konten situs web secara sensus terhadap 25 PTNBH (daftar per September 2026), dilakukan pada 1 November 2026 melalui penelusuran mesin pencari dan pengambilan halaman PPID serta direktorat keuangan. Enam indikator biner dinilai; waktu publikasi diukur dari tanggal unggah atau folder berkas. Perbandingan PTNBH angkatan awal (ditetapkan sampai 2015, n = 11) dan angkatan baru (n = 14) memakai uji eksak Fisher dan Mann–Whitney. Hasil: Seluruh PTNBH memiliki portal PPID, tetapi laporan keuangan tahunan hanya ditemukan pada 20 PTNBH (80%), laporan TA 2025 pada 18 (72%), dan laporan TA 2025 berlabel audit pada 17 (68%). Tiga belas PTNBH memenuhi keenam indikator, sedangkan lima (UB, UNSRI, UPI, UT, UNS) tidak memiliki laporan keuangan yang dapat ditemukan. Dari 11 laporan TA 2025 yang tanggal publikasinya teridentifikasi, sembilan tayang paling lambat Juni 2026. Empat dari 20 PTNBH menyimpan laporan di Google Drive atau SharePoint. Empat PTNBH berpredikat "Informatif" pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 tidak menampilkan laporan TA 2025. Perbedaan angkatan awal dan baru tidak bermakna secara statistik (81,8% vs 57,1%; p = 0,234). Kesimpulan: Pengungkapan laporan keuangan PTNBH sudah menjadi praktik mayoritas, tetapi belum universal, dan predikat keterbukaan informasi tidak menjamin laporan keuangan tersedia. Diperlukan repositori laporan keuangan PTNBH yang terpusat, tenggat publikasi yang tegas, dan butir penilaian Komisi Informasi yang memeriksa keberadaan laporan keuangan teraudit secara langsung.

Kata kunci: transparansi keuangan; PTNBH; laporan keuangan; keterbukaan informasi publik; pengungkapan daring; akuntabilitas perguruan tinggi

Abstract

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

Background: Indonesia's legal-entity state universities (PTNBH) manage their finances autonomously and draw much of their revenue from students and the public. The Public Information Disclosure Law requires public bodies to publish financial statements periodically, but existing assessments by the Information Commission are holistic and do not show whether the core financial documents are actually online. Objective: To examine whether all 25 PTNBH disclose annual financial statements, audited statements for fiscal year (FY) 2025, a multi-year archive, and budget documents on their official websites, and how quickly the FY2025 statements were published. Methods: A census website content audit of 25 PTNBH, conducted on 1 November 2026 through search-engine queries and retrieval of disclosure-office (PPID) and finance-directorate pages. Six binary indicators were scored; publication timing was taken from posting dates or file-folder dates. Early (designated by 2015, n = 11) and later PTNBH (n = 14) were compared with Fisher's exact and Mann–Whitney tests. Results: All 25 universities run a PPID portal, but annual financial statements were found for only 20 (80%), FY2025 statements for 18 (72%), and FY2025 statements labelled as audited for 17 (68%). Thirteen met all six indicators; five had no locatable financial statements. Nine of the 11 FY2025 reports with an identifiable date appeared by June 2026. Four of 20 universities host their statements on Google Drive or SharePoint. Four universities rated "Informative" in the 2025 national disclosure awards did not show FY2025 statements. Differences between early and later PTNBH were not statistically significant (81.8% vs 57.1%; p = 0.234). Conclusion: Financial-statement disclosure is now the majority practice among PTNBH but not universal, and a high disclosure rating does not guarantee that financial statements are available. A central repository, a firm publication deadline, and an Information Commission criterion that checks directly for audited statements are recommended.
Keywords: financial transparency; legal-entity state universities; financial statements; public information disclosure; online disclosure; university accountability

PENDAHULUAN

Sejak UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi negeri dapat berstatus badan hukum (PTNBH) dengan otonomi pengelolaan keuangan yang luas: kekayaan awal dipisahkan dari kekayaan negara, tarif ditetapkan sendiri, dan pendapatan dikelola tanpa mekanisme penerimaan negara bukan pajak. Jumlah PTNBH bertambah dari 11 institusi angkatan awal menjadi 21 pada 2022, lalu 25 pada September 2026 setelah Universitas Negeri Jakarta (PP Nomor 31 Tahun 2024), Universitas Sriwijaya (PP Nomor 32 Tahun 2024), dan Universitas Udayana (PP Nomor 35 Tahun 2026) ditetapkan. Bersama Universitas Islam Internasional Indonesia di bawah Kementerian Agama, ke-25 institusi ini mengelola aset triliunan rupiah; laporan keuangan Universitas Indonesia TA 2025, misalnya, mencatat total aset Rp6,93 triliun dan pendapatan Rp3,95 triliun.

Otonomi ini disertai kewajiban akuntabilitas publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menetapkan laporan keuangan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menegaskan bahwa pengumuman itu dilakukan antara lain melalui situs resmi badan publik. Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) pada 2024 memperlihatkan bahwa dasar penetapan biaya kuliah dan penggunaan dana di perguruan tinggi negeri menjadi perhatian publik, sehingga

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.285

ketersediaan laporan keuangan bukan sekadar urusan administratif.

Satu-satunya penilaian keterbukaan yang mencakup perguruan tinggi negeri secara nasional adalah monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi Pusat. Monev 2025 menilai 387 badan publik; 197 di antaranya meraih kualifikasi "Informatif", sementara 121 dinyatakan "Tidak Informatif", termasuk 68 perguruan tinggi negeri (Komisi Informasi Pusat, 2025). Skor monev merupakan gabungan banyak aspek, mulai dari sarana layanan, pengumuman informasi, hingga inovasi, sehingga tidak menunjukkan secara langsung apakah dokumen keuangan pokok, yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, tersedia bagi publik.

Kajian tentang pengungkapan daring di sektor publik menunjukkan bahwa ketersediaan situs web tidak sama dengan keterbukaan substantif. Pina et al. (2010) menemukan bahwa e-government di pemerintah daerah Eropa lebih banyak menyajikan informasi layanan daripada informasi keuangan. Gallego-Álvarez et al. (2011) menunjukkan bahwa pengungkapan daring universitas di Spanyol bervariasi menurut ukuran dan karakteristik institusi. Di Indonesia, Nor et al. (2019) menemukan bahwa opini audit memengaruhi kesediaan pemerintah daerah mengunggah laporan keuangan ke situs resmi, sedangkan Agustina et al. (2025) menunjukkan bahwa pengungkapan antikecurangan di situs universitas negeri lebih lengkap daripada universitas swasta tetapi tetap rendah. Belum ada kajian yang secara sensus memeriksa keberadaan laporan keuangan teraudit pada seluruh PTNBH, padahal kelompok inilah yang otonomi keuangannya paling besar.

Artikel ini memiliki tiga tujuan: (1) memetakan apakah 25 PTNBH mengungkapkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan teraudit TA 2025, arsip multitahun, dan dokumen anggaran di situs resmi; (2) mengukur ketepatan waktu publikasi laporan TA 2025; dan (3) membandingkan hasil audit dengan predikat keterbukaan informasi 2025 serta antara PTNBH angkatan awal dan angkatan baru.

Kerangka Konseptual

Transparansi dipahami sebagai ketersediaan informasi tentang suatu organisasi yang memungkinkan pihak luar memantau kinerja dan keputusannya (Meijer, 2009; Grimmelikhuijsen & Welch, 2012). Heald (2006) membedakan transparansi nominal, yaitu informasi yang secara formal diumumkan, dari transparansi efektif, yaitu informasi yang benar-benar dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan. Pembedaan ini relevan untuk laporan keuangan: dokumen yang diwajibkan tetapi sulit ditemukan, terlambat, atau disimpan di layanan pihak ketiga memenuhi kewajiban secara nominal tetapi kurang efektif.

Dalam kerangka akuntabilitas, laporan keuangan teraudit adalah medium utama bagi PTNBH untuk menjelaskan penggunaan dana kepada forum yang berhak menilai, yaitu Majelis Wali Amanat, pemerintah, dan masyarakat (Bovens, 2007). Teori keagenan menjelaskan mengapa audit independen dan publikasi diperlukan: pengelola memiliki informasi lebih banyak daripada pemberi dana (Jensen & Meckling, 1976). Teori kelembagaan menambahkan bahwa organisasi dapat mengadopsi struktur formal, seperti portal PPID, karena tekanan legitimasi tanpa mengubah praktik substantif, yang disebut decoupling (Meyer & Rowan, 1977), dan bahwa organisasi

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

dalam satu bidang cenderung saling meniru (DiMaggio & Powell, 1983). Dari kerangka ini diturunkan dua dugaan yang diperiksa secara deskriptif: portal keterbukaan lebih umum daripada pengungkapan laporan keuangan itu sendiri, dan PTNBH angkatan awal, yang lebih lama berada di bawah tuntutan akuntabilitas badan hukum, mengungkapkan lebih lengkap daripada PTNBH angkatan baru.

METODE

Rancangan. Studi ini adalah audit konten situs web (website content analysis) secara sensus dengan unit analisis PTNBH. Populasi adalah 25 PTNBH yang tercantum pada daftar per 15 September 2026, setelah Universitas Udayana ditetapkan (Swasty, 2026). Universitas Udayana tetap dimasukkan walaupun berstatus PTNBH setelah TA 2025 berakhir; laporan TA 2025-nya disusun saat masih berstatus badan layanan umum.

Penyimpangan dari rancangan awal. Rancangan awal mencakup sekolah dan kampus, sesuai judul kerja. Komponen sekolah tidak dilaksanakan karena tiga alasan. Pertama, tidak ada kerangka sampel situs resmi sekolah yang dapat ditelusuri; sebagian besar sekolah tidak memiliki domain sendiri. Kedua, kewajiban publikasi penggunaan dana BOS diatur melalui papan informasi sekolah dan aplikasi pelaporan Kementerian, bukan situs sekolah, sehingga ketiadaan laporan di situs sekolah tidak dapat ditafsirkan sebagai ketidakpatuhan. Ketiga, waktu dan akses tidak memungkinkan pengambilan sampel acak sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan. Rancangan juga semula mencakup perguruan tinggi swasta, tetapi kewajiban keterbukaan PTS sebagai badan publik berbeda dan populasinya terlalu besar untuk sensus. Karena itu judul diubah menjadi khusus PTNBH, dan temuan artikel ini tidak dapat digeneralisasi ke sekolah, PTN badan layanan umum, atau PTS.

Prosedur pengumpulan data. Audit dilakukan pada 1 November 2026. Untuk setiap PTNBH, peneliti (1) menelusuri mesin pencari dengan kata kunci "laporan keuangan audited" dan nama atau domain institusi, (2) membuka portal PPID dan halaman daftar informasi berkala, (3) membuka halaman laporan keuangan direktorat keuangan bila ada, dan (4) membuka berkas laporan terbaru untuk memeriksa tahun buku, status audit, dan, bila teksnya dapat dibaca, nama kantor akuntan publik (KAP), tanggal laporan auditor, dan opini. Penelusuran dan pembacaan halaman dibantu alat pengambil halaman otomatis. Lima portal (PPID UB, PPID UPI, PPID UT, PPID Unpad, dan situs utama UM) gagal diakses atau tidak menampilkan isi melalui alat tersebut; untuk institusi ini penilaian bertumpu pada hasil mesin pencari dan halaman lain di domain yang sama. Catatan audit per institusi beserta tautan disimpan sebagai berkas data pendukung.

Indikator. Enam indikator biner dinilai: (1) portal PPID tersedia; (2) laporan keuangan tahunan institusi (bukan laporan unit atau laporan kinerja) dapat ditemukan dari situs resmi; (3) laporan keuangan TA 2025 tersedia; (4) laporan TA 2025 berlabel audit, yaitu nama berkas atau halaman menyatakan "audited/teraudit" atau dokumen memuat laporan auditor independen; (5) arsip laporan tahunan sedikitnya tiga tahun buku teridentifikasi; dan (6) dokumen anggaran tahun berjalan atau tahun sebelumnya (RKAT, RKA, DIPA, atau laporan realisasi anggaran yang terpisah dari laporan keuangan) tersedia. Skor pengungkapan adalah jumlah keenam indikator (0–6). Dua ukuran tambahan dicatat: lokasi penyimpanan berkas (domain resmi atau layanan pihak ketiga seperti

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.285

Google Drive dan SharePoint) dan bulan laporan TA 2025 terlihat di situs, diambil dari tanggal unggahan atau folder berkas (misalnya /uploads/2026/06/).

Ambang ketepatan waktu. Tidak ada ketentuan seragam tentang tenggat publikasi laporan keuangan PTNBH. Sebagai pembanding, studi ini memakai batas enam bulan setelah tahun buku berakhir (30 Juni 2026), mengikuti tenggat penyampaian laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit menurut Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ambang ini adalah pilihan analitis, bukan kewajiban hukum bagi PTNBH.

Predikat keterbukaan informasi. Predikat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 diambil dari pengumuman resmi institusi atau Kementerian, karena lampiran SK Komisi Informasi Pusat Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tidak dapat diakses (misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2025; Universitas Negeri Semarang, 2025; Universitas Sebelas Maret, 2025). Predikat ditemukan untuk 11 dari 25 PTNBH; sisanya dicatat "tidak ditemukan", bukan "tidak informatif".

Analisis. Hasil disajikan secara deskriptif. PTNBH dikelompokkan menjadi angkatan awal (bekas BHMN dan PTNBH yang ditetapkan sampai 2015, n = 11) dan angkatan baru (ditetapkan sejak 2016, n = 14). Perbedaan proporsi diuji dengan uji eksak Fisher dua arah dan perbedaan skor dengan uji Mann–Whitney. Dengan n = 25, daya uji rendah, sehingga hasil uji dibaca sebagai deskripsi besaran perbedaan, bukan pembuktian.

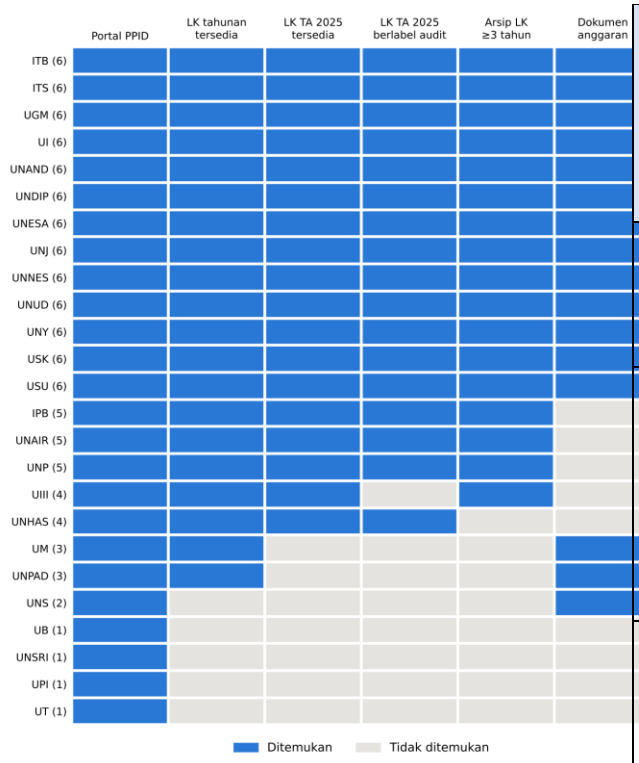
Penafsiran "tidak ditemukan". Indikator bernilai 0 berarti dokumen tidak ditemukan melalui prosedur di atas pada tanggal audit, bukan bukti bahwa dokumen tidak ada. Dari sudut pandang warga, dokumen yang tidak dapat ditemukan melalui mesin pencari dan portal PPID memang tidak tersedia secara efektif, tetapi institusi yang bersangkutan mungkin menyimpannya di halaman yang tidak terindeks atau menyediakannya atas permintaan.

HASIL

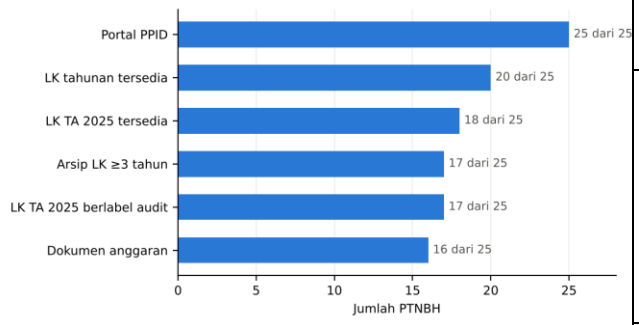
Gambaran umum.

Seluruh 25 PTNBH memiliki portal PPID, tetapi indikator substantif tertinggal di belakangnya (Gambar 1 dan Gambar 2). Laporan keuangan tahunan ditemukan pada 20 PTNBH (80%), laporan TA 2025 pada 18 (72%), dan laporan TA 2025 berlabel audit pada 17 (68%). Arsip sedikitnya tiga tahun teridentifikasi pada 17 PTNBH dan dokumen anggaran pada 16. Skor rata-rata 4,52 dari 6 (median 6). Tiga belas PTNBH memenuhi keenam indikator, sedangkan empat (UB, UNSRI, UPI, UT) hanya memenuhi indikator portal PPID dan UNS hanya menambah dokumen anggaran (RKAT 2026).

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554



Gambar 1. Matriks pengungkapan enam indikator pada 25 PTNBH, diurutkan menurut skor (angka dalam kurung). Sumber: audit situs resmi, 1 November 2026.



Gambar 2. Jumlah PTNBH yang memenuhi setiap indikator (n = 25). Sumber: audit situs resmi, 1 November 2026.

Tabel 1. Ringkasan hasil audit per PTNBH

PTNBH	Tahun PTNBH	Angkatan	LK tahunan terbaru	LK 2025 berlabel audit	Dok. anggaran	Skor (0–6)	Bulan LK 202	Prediksi KIP 2025
ITB	2013	Awal	2025	Ya	Ya	6	–	Informatif
ITS	2014	Awal	2025	Ya	Ya	6	2026-06	Tidak ditemukan
UGM	2013	Awal	2025	Ya	Ya	6	2026-04	Informatif
UI	2013	Awal	2025	Ya	Ya	6	2026-05	Informatif
UNAND	2021	Baru	2025	Ya	Ya	6	–	Tidak ditemukan
UNDIP	2015	Awal	2025	Ya	Ya	6	2026-06	Tidak ditemukan
UNESA	2022	Baru	2025	Ya	Ya	6	–	Tidak ditemukan
U	20	Ba	20	Ya	Ya	6	–	Ti

NJ	24	ru	25					dak ditemukan
UNNES	2022	Baru	2025	Ya	Ya	6	2026-07	Informatif
UNUD	2026	Baru	2025	Ya	Ya	6	2026-09	Tidak ditemukan
UNY	2022	Baru	2025	Ya	Ya	6	2026-06	Tidak ditemukan
USK	2022	Baru	2025	Ya	Ya	6	2026-06	Tidak ditemukan
USU	2014	Awal	2025	Ya	Ya	6	–	Informatif
IPB	2013	Awal	2025	Ya	Tidak	5	2026-05	Informatif
UNAIR	2014	Awal	2025	Ya	Tidak	5	2026-04	Tidak ditemuk
								an
UNP	2021	Baru	2025	Ya	Tidak	5	–	Tidak ditemukan
UIII	2016	Baru	2025	Tidak	Tidak	4	–	Tidak ditemukan
UNHAS	2015	Awal	2025	Ya	Tidak	4	2026-06	Informatif
UM	2021	Baru	2023	Tidak	Ya	3	–	Informatif
UNPAD	2014	Awal	2024	Tidak	Ya	3	–	Informatif
UNS	2020	Baru	–	Tidak	Ya	2	–	Informatif
UB	2021	Baru	–	Tidak	Tidak	1	–	Tidak ditemukan
UNSRI	2024	Baru	–	Tidak	Tidak	1	–	Informatif
UPI	2014	Awal	–	Tidak	Tidak	1	–	Tidak dit

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

								emukan
UT	2022	Baru	–	Tidak	Tidak	1	–	Tidak ditemukan

Catatan: tahun PTNBH untuk bekas BHMN ditulis menurut penetapan statuta PTNBH. "–" = tidak ditemukan atau tidak teridentifikasi. Predikat KIP diambil dari pengumuman institusi; "Tidak ditemukan" bukan berarti tidak informatif. Sumber: audit situs resmi, diolah.

PTNBH tanpa laporan keuangan yang dapat ditemukan.

Lima PTNBH tidak menampilkan laporan keuangan tahunan yang dapat ditemukan. Pola di balik kelimanya berbeda. Daftar Informasi Publik UB tahun 2024 mencantumkan "laporan keuangan perguruan tinggi tahun sebelumnya yang telah diaudit" sebagai informasi berkala dan informasi tersedia setiap saat, tetapi tidak menyebut tautan, dan berkasnya tidak ditemukan. Laporan Tahunan Rektor UPI 2025 menyebut bahwa laporan keuangan konsolidasian 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, dan PPID UPI memublikasikan kontrak pengadaan KAP, tetapi laporan keuangannya sendiri tidak ditemukan. Opini wajar atas laporan UT TA 2024 oleh KAP Heliantono & Rekan diberitakan media (Detik, 2025), tetapi laporannya tidak ditemukan di situs UT. Daftar informasi berkala UNS tidak memuat butir laporan keuangan sama sekali, sedangkan UNSRI, yang berstatus PTNBH sejak 2024, hanya menampilkan laporan kinerja. Pada dua PTNBH lain laporan terbaru tertinggal: laporan termutakhir UM adalah TA 2023, dan Unpad TA 2024.

Status audit dan isi laporan.

Pada 17 PTNBH dengan laporan TA 2025 berlabel audit, label sebagian besar hanya terlihat pada nama berkas atau judul halaman. Laporan auditor independen dapat dibaca langsung pada tiga dokumen (Tabel 2); pada dokumen lain teks tidak dapat diekstrak oleh alat pembaca, misalnya berkas IPB yang berupa hasil pindaian, atau bagian laporan auditor tidak termuat. Ketiga laporan yang terbaca memperoleh opini tanpa modifikasian dengan tanggal laporan auditor antara 25 April dan 8 Mei 2026. Dua catatan tambahan menunjukkan variasi kualitas penyajian: UIII menyimpan laporan 2021–2025 di Google Drive tanpa keterangan status audit, dan Unand menyajikan laporan TA 2024 hanya dalam bentuk ringkasan eksekutif.

Tabel 2. Informasi audit atas laporan keuangan yang dapat diverifikasi

PTNBH	Laporan	Kantor akuntan publik	Tanggal laporan auditor	Opini	Sumber informasi
UI	LK konsolidasian TA 2025	Purwanto, Susanti dan Surja (anggota EY)	8 Mei 2026	Tanpa modifikasian	Dokumen di PPID UI
ITS	LK konsolidasian TA 2025	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo	27 April 2026	Tanpa modifikasian	Dokumen di PPID ITS
UNP	LK konsolidasia	Tjahjo, Mach	25 April	Tanpa modif	Dokumen di

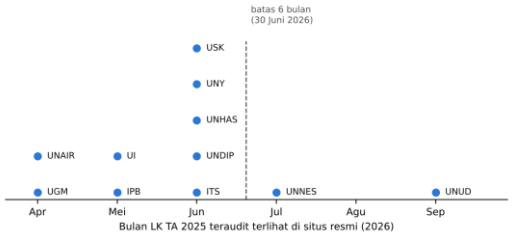
DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.285

	n TA 2025	djud Modopuro & Rekan	2026*	ikasian	situs Dituka UNP
UPI	LK konsolidasian TA 2025	Tidak disebut	Tidak disebut	WTP	Laporan Tahunan Rektor 2025
UT	LK TA 2024	Heliantono & Rekan	Exit meeting 20 Maret 2025	WTP	Berita media (Detik, 2025)

* Tanggal dibaca dari hasil OCR dan perlu diverifikasi pada dokumen asli. Dua baris terakhir bukan laporan yang tersedia di situs; dicantumkan untuk menunjukkan bahwa audit dilakukan walaupun laporannya tidak dipublikasikan. Sumber: dokumen dan berita, diolah.

Ketepatan waktu dan lokasi penyimpanan.

Bulan tayang laporan TA 2025 dapat diidentifikasi pada 11 PTNBH (Gambar 3). Sembilan tayang paling lambat Juni 2026, dengan UGM dan Unair paling awal (April). UNNES (Juli) dan Udayana (September) melewati ambang enam bulan; Udayana sedang beralih status saat itu. USK mengunggah laporan TA 2024 dan TA 2025 pada bulan yang sama (Juni 2026), yang berarti laporan TA 2024 baru tersedia sekitar 18 bulan setelah tahun buku berakhir. Dari 20 PTNBH dengan laporan yang dapat ditemukan, 16 menyimpan berkas di domain resmi, sedangkan empat (Unand, UNNES, Unesa, UIII) menautkan laporan terbarunya ke Google Drive atau SharePoint.



Gambar 3. Bulan laporan keuangan TA 2025 teraudit terlihat di situs resmi (n = 11 PTNBH dengan tanggal teridentifikasi). Garis putus-putus menandai batas enam bulan setelah tahun buku. Sumber: tanggal unggahan dan folder berkas, diolah.

Perbandingan angkatan dan predikat keterbukaan.

PTNBH angkatan awal lebih sering menampilkan laporan TA 2025 berlabel audit (9 dari 11; 81,8%) dibanding angkatan baru (8 dari 14; 57,1%), tetapi perbedaan ini tidak bermakna secara statistik (uji eksak Fisher, p = 0,234). Skor median kedua kelompok adalah 6 dan 5,5, dengan rata-rata 4,91 dan 4,21 (Mann–Whitney U = 87,5; p = 0,554). Empat dari lima PTNBH tanpa laporan keuangan yang dapat ditemukan berasal dari angkatan baru (UB, UNS, UT, UNSRI), sedangkan satu dari angkatan awal (UPI).

Predikat "Informatif" 2025 ditemukan untuk 11 PTNBH. Tujuh di antaranya menampilkan laporan TA 2025 berlabel audit, tetapi empat tidak: UNS (skor monev 96,40) dan UNSRI (94,55) tidak menampilkan laporan keuangan tahunan sama sekali, sedangkan UM dan Unpad hanya menampilkan laporan TA 2023 dan TA 2024. Sebaliknya, beberapa PTNBH dengan pengungkapan lengkap, seperti ITS, Unair, Undip, UNY, dan UNJ, tidak ditemukan pengumuman predikatnya. Dengan data yang tidak lengkap ini, predikat keterbukaan dan keberadaan laporan keuangan tidak menunjukkan hubungan yang jelas.

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

Praktik baik di luar indikator.
Beberapa PTNBH menyajikan informasi keuangan yang melampaui laporan tahunan. UI, Undip, Unand, UNNES, ITS, dan UNJ memublikasikan realisasi penerimaan dan penggunaan UKT; UNNES menyediakan dasbor serapan anggaran waktu nyata; IPB, USU, Undip, dan Udayana memublikasikan laporan keuangan semester atau triwulan 2026; UNY dan UPI memublikasikan dokumen penunjukan atau pengadaan KAP; dan UI, UGM, Unair, serta UNJ menyediakan arsip laporan lebih dari sepuluh tahun.

PEMBAHASAN

Temuan utama artikel ini adalah kesenjangan antara struktur keterbukaan dan isi keterbukaan. Semua PTNBH memiliki portal PPID, tetapi satu dari lima tidak menampilkan laporan keuangan tahunan yang dapat ditemukan, dan hampir sepertiga tidak menampilkan laporan TA 2025 berlabel audit sepuluh bulan setelah tahun buku berakhir. Pola ini sesuai dengan dugaan decoupling dalam teori kelembagaan (Meyer & Rowan, 1977): portal PPID adalah struktur formal yang dinilai dan diberi penghargaan, sementara publikasi laporan keuangan adalah praktik substantif yang tidak selalu mengikutinya. Kasus UB dan UPI memperlihatkan bentuk paling jelas dari kesenjangan ini: kewajiban publikasi tercantum dalam daftar informasi publik, audit dilakukan, opini diumumkan, tetapi dokumennya tidak dapat ditemukan.

Temuan bahwa empat PTNBH berpredikat "Informatif" tidak menampilkan laporan TA 2025 perlu dibaca hati-hati karena predikat hanya ditemukan untuk 11 institusi dan monev Komisi Informasi menilai banyak aspek selain laporan keuangan. Namun temuan ini cukup untuk menunjukkan bahwa predikat keterbukaan tidak dapat dijadikan pengganti pemeriksaan langsung atas ketersediaan laporan keuangan. Dalam istilah Heald (2006), predikat mengukur sesuatu yang lebih dekat dengan kapasitas dan prosedur keterbukaan daripada transparansi efektif atas keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Pina et al. (2010) bahwa perkembangan e-government tidak otomatis menghasilkan pengungkapan keuangan yang lebih akuntabel.

Perbedaan antara angkatan awal dan baru searah dengan dugaan bahwa lama berstatus badan hukum memperkuat rutinitas pelaporan: PTNBH bekas BHMN seperti UI, UGM, dan Unair telah memublikasikan laporan teraudit sejak akhir 2000-an. Namun perbedaannya tidak bermakna, dan beberapa PTNBH angkatan baru seperti UNJ, Unesa, UNY, dan USK justru memiliki arsip panjang yang mendahului status badan hukumnya. Isomorfisme mimetik (DiMaggio & Powell, 1983) tampaknya terjadi pada format, misalnya pemakaian nama berkas "LK Audited" dan penyatuan laporan dalam menu informasi berkala, lebih daripada pada kelengkapan.

Dua masalah kualitas patut diperhatikan walaupun laporan tersedia. Pertama, penyimpanan di Google Drive atau SharePoint membuat laporan bergantung pada akun pribadi atau institusional yang dapat dihapus atau diubah izinnya, tidak terindeks oleh mesin pencari, dan menyulitkan pemeriksaan keaslian. Kedua, laporan dalam bentuk pindaian dan ringkasan eksekutif menghambat analisis oleh pihak luar. Kedua masalah ini termasuk dimensi kegunaan informasi yang menurut Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) menentukan apakah transparansi berbasis komputer benar-benar memungkinkan pemantauan.

Implikasi kebijakannya ada tiga. Pertama, kementerian dapat mewajibkan

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.285

PTNBH mengunggah laporan keuangan teraudit ke repositori terpusat dengan format yang dapat dibaca mesin, sebagaimana laporan emiten dihimpun oleh bursa. Kedua, statuta atau peraturan menteri dapat menetapkan tenggat publikasi, misalnya enam bulan setelah tahun buku, yang saat ini dipenuhi oleh sebagian besar PTNBH yang tanggalnya teridentifikasi sehingga tidak memberatkan. Ketiga, instrumen monev Komisi Informasi untuk perguruan tinggi dapat memuat butir verifikasi langsung: apakah laporan keuangan teraudit tahun buku terakhir tersedia di situs resmi pada tanggal penilaian.

Keterbatasan

Pertama, audit dilakukan satu kali pada satu tanggal, sehingga laporan yang diunggah sesudahnya atau yang sedang tidak dapat diakses tidak tertangkap. Kedua, lima portal gagal dibaca melalui alat pengambil halaman otomatis; kegagalan ini mungkin disebabkan pemblokiran akses otomatis, bukan ketiadaan dokumen, dan perlu diverifikasi secara manual melalui peramban. Ketiga, status audit sebagian besar dinilai dari label, bukan dari pembacaan laporan auditor; label yang keliru tidak dapat dideteksi. Keempat, bulan tayang diukur dari folder unggahan dan tanggal halaman, yang dapat berbeda dari tanggal laporan pertama kali tersedia. Kelima, predikat keterbukaan hanya ditemukan untuk 11 PTNBH. Keenam, studi ini tidak menilai isi laporan, seperti kewajaran tarif UKT atau komposisi belanja, dan tidak mencakup sekolah, PTN badan layanan umum, maupun PTS.

KESIMPULAN

Pengungkapan laporan keuangan di situs resmi telah menjadi praktik mayoritas PTNBH: 20 dari 25 menampilkan laporan keuangan tahunan, 17 menampilkan laporan TA 2025 berlabel audit, dan sebagian besar laporan dengan tanggal teridentifikasi tayang dalam enam bulan setelah tahun buku. Namun praktik ini belum universal. Lima PTNBH, termasuk institusi yang mengumumkan opini audit atau berpredikat "Informatif", tidak menampilkan laporan keuangan yang dapat ditemukan, dan empat PTNBH bergantung pada layanan penyimpanan pihak ketiga. Kepemilikan portal PPID dan predikat keterbukaan tidak menjamin dokumen keuangan pokok tersedia bagi publik. Penelitian lanjutan perlu mengulangi audit secara berkala, memverifikasi secara manual portal yang gagal diakses, memperluas cakupan ke PTN badan layanan umum dan sekolah dengan rancangan sampel yang sesuai, serta menilai mutu isi laporan.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data audit per PTNBH (audit_ptnbh_2026.csv), catatan audit beserta tautan sumber (catatan_audit.md), skrip analisis dan gambar (analisis_gambar_ptnbh.py), serta hasil analisis (hasil_analisis.txt) tersedia pada folder data-transparansi-ptnbh yang menyertai naskah ini. Karena isi situs dapat berubah, setiap tautan dicatat dengan tanggal akses 1 November 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, L., SeTin, S., & Debbianita, D. (2025). University mission statements and anti-fraud disclosures: Public vs private universities in Indonesia. Journal of Financial Crime, 32(4), 790–803. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2024-0185

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Detik. (2025, 21 Maret). Kembali raih opini WTP 2025, UT sukses buktikan transparansi keuangan PTNBH. detikEdu. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7834375/kembali-raih-opini-wtp-2025-ut-sukses-buktikan-transparansi-keuangan-ptnbh

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Gallego-Álvarez, I., Rodríguez-Domínguez, L., & García-Sánchez, I.-M. (2011). Information disclosed online by Spanish universities: Content and explanatory factors. Online Information Review, 35(3), 360–385. https://doi.org/10.1108/14684521111151423

Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W. (2012). Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments. Public Administration Review, 72(4), 562–571. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02532.x

Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Dalam C. Hood & D. Heald (Ed.), Transparency: The key to better governance? (hlm. 25–43). Oxford University Press.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). UNSRI kembali raih kategori "Informatif" di ajang Anugerah KIP tahun 2025. https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/unsri-kembali-raih-kategori-informatif-di-ajang-anugerah-kip-tahun-2025

Komisi Informasi Pusat. (2025, 15 Desember). Monev KIP 2025: KI Pusat mengumumkan ratusan badan publik tidak informatif. https://komisiinformasi.go.id/read/15/12/2025/Monev-KIP-2025:-KI-Pusat-Mengumumumkan-Ratusan-Badan-Publik-Tidak-Informatif

Meijer, A. (2009). Understanding modern transparency. International Review of Administrative Sciences, 75(2), 255–269. https://doi.org/10.1177/0020852309104175

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550

Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. Asian Journal of Accounting Research, 4(1), 112–128. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta. (2024).

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.285

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya. (2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana. (2026).

Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments? International Public Management Journal, 13(4), 350–380. https://doi.org/10.1080/10967494.2010.524834

Swasty, R. (2026, 15 September). 25 kampus negeri berstatus PTN-BH dan akreditasinya, Unud resmi join! Medcom.id. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/PNg123Rk-25-kampus-negeri-berstatus-ptn-bh-dan-akreditasinya-unud-resmi-join

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).

Universitas Negeri Semarang. (2025). Raih skor 98.87, UNNES jadi perguruan tinggi informatif terbaik se-Indonesia. https://unnes.ac.id/raih-skor-98-87-unnes-jadi-perguruan-tinggi-informatif-terbaik-se-indonesia/

Universitas Sebelas Maret. (2025). UNS raih kualifikasi informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-raih-kualifikasi-informatif-pada-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-2025.html

Lampiran. Lokasi sumber per PTNBH

Tabel L1. Halaman sumber utama dan catatan audit (diakses 1 November 2026)

Kode	PTNBH	Halaman sumber utama	Catatan audit
IPB	IPB University	ppid.ipb.ac.id/laporan-keuangan-ipb	LK audited 2016-2025 dan LK Smt I 2026; opini WTP dari PwC (berita IPB); RKAT terpisah tidak ditemukan
ITB	Institut Teknologi Bandung	ppid.itb.ac.id/informasi-publik/laporan-keuangan-itb-audited-lengkap	LK audited 2016-2025 di konfirmasi.itb.ac.id; RKAT; realisasi anggaran hanya 2021
ITS	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	its.ac.id/ppid/informasi-berkala	LAI 2025 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo 27 Apr 2026 opini WTM; RKAT 2024;

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

			realisasi anggaran 2025
UB	Universitas Brawijaya	ppid.ub.ac.id (gagal diakses)	DIP 2024 mewajibkan LK audited; berkas tidak ditemukan; portal PPID tak terbaca
UGM	Universitas Gadjah Mada	ugm.ac.id/id/3621-laporan-keuangan	LK audited 2006-2025; LK 2025 diunggah 13 Apr 2026; PerMWA pengesahan RKAT 2025
UI	Universitas Indonesia	ppid.ui.ac.id/laporan-keuangan-ui	LK 2009-2025; LAI 2025 KAP Purwanto Susanti dan Surja (EY) 8 Mei 2026 opini WTM; ringkasan RKT/RKA dan realisasi
			UKT
UIII	Universitas Islam Internasional Indonesia	ppid.uiii.ac.id/laporan-keuangan	LK 2021-2025 di Google Drive tanpa status audit; laporan tahunan 2021-2025
UM	Universitas Negeri Malang	um.ac.id (gagal diakses; berkas LK 2023 via pencarian)	LK terbaru TA 2023 audited; RKAT PTNBH 2025
UNAIR	Universitas Airlangga	ditkeu.unair.ac.id/unduhan	LK audited 2007-2025 (kecuali 2016); RKAT tidak ditemukan
UNAND	Universitas Andalas	ppid.unand.ac.id/index.php/informasi-publik/informasi-yang-wajib-disediakan-berkala	LK 2025 audited di SharePoint; 2024 ringkasan eksekutif; RKAT 2025-2026; realisasi s.d. Agt 2026
UNDIP	Universitas Diponegoro	ppid.undip.ac.id/laporan-keuangan	LK 2021-2025; LK audited TA 2025 konsolid

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v5i1.285

			asian; RKAT 2025; realisasi UKT 2025
UNESA	Universitas Negeri Surabaya	ppid.unesa.ac.id/page/laporan-keuangan	LK audited 2019-2025 semua di Google Drive; realisasi anggaran dan DIPA
UNHAS	Universitas Hasanuddin	ppid.unhas.ac.id (berkas LK 2025)	LK 2025 audit (SAK) dan Laporan Audit 2025; tahun lain tidak teridentifikasi
UNJ	Universitas Negeri Jakarta	ppid.unj.ac.id/arsip/laporan-keuangan-audit	arsip LK teraudit 2014-2025; LRA neraca arus kas 2025; realisasi UKT 2025
UNNES	Universitas Negeri Semarang	unnes.ac.id/ppid/daftar-informasi-wajib-berkala	LK 2019-2025; LK 2025 di Google Drive; RKAT 2022-2026;
			skor KIP 98.87
UNP	Universitas Negeri Padang	dituka.unp.ac.id; ppid.unp.ac.id	LK 2021-2025; LAI 2025 KAP Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan 25 Apr 2026 opini WTM
UNPAD	Universitas Padjadjaran	sdgs.unpad.ac.id/publication-of-universitas-padjadjaran-financial-data	LK 2024 audited (SAP dan konsolidasi); LK 2025 tidak ditemukan; menu Laporan RKAT
UNS	Universitas Sebelas Maret	ppid.uns.ac.id/daftar-informasi-publik	DIP berkala tanpa item LK; RKAT 2026 dipublikasi; skor KIP 96.40
UNSRI	Universitas Sriwijaya	ppid.unsri.ac.id	LK tidak ditemukan; hanya LAKIN; skor KIP 94.55

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

UNUD	Universitas Udayana	ppid.unud.ac.id/pages/view/dokumen-keuangan-universitas-udayana	PTNBH sejak Sep 2026 (PP 35/2026); LK audited 2025 diunggah 2026-09; perencanaan dan realisasi anggaran
UNY	Universitas Negeri Yogyakarta	uny.ac.id/id/laporan-keuangan	LK 2011-2025 di uny.ac.id; arsip KAP di PPID berhenti di 2023; penunjukan KAP dipublikasi
UPI	Universitas Pendidikan Indonesia	ppid.upi.edu (gagal diakses); dit-keuangan.upi.edu/read/page/laporan-keuangan (tanpa isi)	Portal PPID dan halaman keuangan tak terbaca; Laporan Tahunan Rektor 2025 menyebut opini WTP LK 2025
USK	Universitas Syiah Kuala	ppid.usk.ac.id/dokumen-dokumen-berkaitan-keuangan	LK 2017-2025; LK 2024 dan 2025 sama-sama diunggah 2026-06; DIPA dan RKA-KL 2017-2026
USU	Universitas Sumatera Utara	ppid.usu.ac.id/id/laporan-keuangan	LK 2016-2025; 2025 konsolidasian audited; RKAT 2024; LRA-RKAT 2023
UT	Universitas Terbuka	ppid.ut.ac.id (isi tidak terbaca)	LK tidak ditemukan; berita: opini WTP LK 2024 oleh KAP Heliantono & Rekan

Sumber: audit situs resmi. Tautan lengkap per berkas tercantum dalam catatan_audit.md.

CC BY NC SA